PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Nomo 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 681227–68174, Pos-el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 000.8.6.3/ 4908 /418.27/2025

TENTANG
RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran dalam pelaksanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri tahun 2026, perlu disusun Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri sesuai Perjanjian Kinerja yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri tentang Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 - 2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026;

13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026;

14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri Tahun 2026.

KEDUA : Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2026 menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi, Laporan Kinerja Interim dan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri Tahun 2026.

KETIGA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

ttd.

JOKO SUWONO

Salinan disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Kediri (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
3. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19750103 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Nomo 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 681227–68174, Pos-el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR: 000.8.6.3/ 4907 /418.27/2025
TENTANG
HASIL RAPAT PENETAPAN RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

Pada hari ini, Jumat Tanggal 05 Bulan Desember Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat penyusunan Penetapan Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri sebagai berikut;

Pimpinan Rapat
1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri

Peserta Rapat
1. Pejabat Struktural di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Kediri
2. Pejabat Fungsional di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Kediri
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Kediri

Hasil Rapat
1. Penyusunan Rencana Aksi Capaian Kinerja yang dilampirkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri tentang Penetapan Rencana Aksi Capaian Kinerja;
2. Rencana Aksi Capaian Kinerja dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja Indikator Kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja interim, dan implementasi akuntabilitas kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri;
3. Perlu disusun Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri terkait Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kediri **Ir. ROOSANA TRI K, M.M.**	**1.** .....
2	Koordinator Tim Penanaman Modal **DEVIN MARSFIAN S., S.E., M.Si.**	**2.** .....
3	Koordinator Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu **MERY PURWANTY, SS., MM**	**3.** .....

4 Perencana Ahli Muda
YUDHA R. KURNIAWATI, S.IP.

4. .....

Mengetahui,
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri

JOKO SUWONO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197501031993111001

Lampiran
Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri
Nomor : 000.8.6.3/ 4908/418.27/2025
Tanggal : 05 Desember 2025

RENCANA AKSI KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TUJUAN: Meningkatkan investasi di daerah	Persentase peningkatan investasi	3.01%										3.01%		
	SASARAN: Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal di Daerah	Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)	1.59				0.20		0.795		0.90		1.59		
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**Persentase Realisasi Investasi**	**12%**	**124,599,700**	**50%**	**220,070,560**	**56%**	**222,811,560**	**100%**	**227,796,560**	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		*Jumlah Fasilitasi Penanaman Modal*	-	*93,414,100*	-	*141,034,960*	-	*141,034,960*	*1 dokumen*	*143,858,960*	
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan	1. Penyusunan Perbup Insentif Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan	-	93,414,100	-	118,018,960	-	118,018,960	1 dokumen	120,842,960	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Penanaman Modal	2. Sosialisasi Perda PM	Penanaman Modal									
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kemitraan Berusaha antara usaha besar/ menengah dengan UMKM daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	-	23,016,000	1 Dokumen	23,016,000	1 Dokumen	23,016,000	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		*Jumlah Dokumen Peta potensi dan peluang usaha yang disusun*	-	*31,185,600*	-	*79,035,600*	*2 dokumen*	*81,776,600*	*2 dokumen*	*83,937,600*	
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Persiapan Penyusunan RUPM 2025-2045	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	11,106,100	-	19,686,100	1 dokumen	19,686,100	1 dokumen	19,777,100	
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Bimtek Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	20,079,500	-	59,349,500	1 dokumen	62,090,500	1 dokumen	64,160,500	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		**Persentase Peningkatan Minat Investor yang Berinvestasi**	**-**	**35,794,600**	**-**	**83,914,600**	**-**	**216,956,600**	**20%**	**216,956,600**	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		*Jumlah kepeminatan investor*	-	*35,794,600*	-	*83,914,600*	-	*216,956,600*	*1 investor*	*216,956,600*	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pameran investasi (3 kali) 2. Promosi langsung ke	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	18,455,000	1 Dokumen	66,575,000	1 Dokumen	196,367,000	2 Dokumen	196,367,000	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
					perusahaan (3 kali)										
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Market Intelegence 2. Market Research	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	17,339,600	1 Dokumen	17,339,600	1 Dokumen	20,589,600	1 Dokumen	20,589,600	
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	-	**53,369,260**	-	**84,763,760**	**16%**	**178,455,760**	**100%**	**182,655,760**	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		*Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian penanaman modal*	-	*53,369,260*	-	*84,763,760*	*50 proyek*	*178,455,760*	*305 proyek*	*182,655,760*	
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Konsultasi Penyelesaian Permasalahan yang diusulkan pelaku usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	6,433,000	-	6,433,000	-	23,215,000	5 Kegiatan Usaha	23,515,000	
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	1,482,400	50 Pelaku Usaha	67,932,400	200 Pelaku Usaha	67,932,400	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
					(7 kali)										
				Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Pelaku usaha yang diusulkan SKPD, pelaporan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	46,936,160	-	76,848,660	-	87,308,660	50 Kegiatan Usaha	91,208,660	
	SASARAN: Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan (Indeks)	88.16										88.16		
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**14%**	**87,362,200**	**34%**	**387,476,600**	**69%**	**459,982,000**	**100%**	**502,786,200**	
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		*Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan*	*1500 Pelaku Usaha*	*87,362,200*	*3500 Pelaku Usaha*	*387,476,600*	*7050 Pelaku Usaha*	*459,982,000*	*10100 Pelaku Usaha*	*502,786,200*	
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui	1. Administrasi Pelayanan; 2. Sewa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan	1500 Pelaku Usaha	72,627,200	3500 Pelaku Usaha	349,331,600	7000 Pelaku Usaha	410,598,000	10000 Pelaku Usaha	436,402,200	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Aplikasi "Kesatu"; 3. Revisi Standar Operasional Prosedur MPP dan Standard Pelayanan 4. Sosialisasi Perizinan Berusaha (4 kali) 5. FKP 2 kali 6. Pelayanan Keliling	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	1. Rapat Koordinasi Sektor teknis 2 kali	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		14,735,000		38,145,000	50 Pelaku Usaha	49,384,000	100 Pelaku Usaha	66,384,000	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**23%**	**88,632,070**	**53%**	**198,159,320**	**69%**	**228,366,320**	***100%***	**228,366,320**	
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Tersedia untuk Publik*	*23%*	*88,632,070*	*53%*	*198,159,320*	*69%*	*228,366,320*	*100%*	*228,366,320*	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	laporan pelayanan: 4 laporan Buku Kinerja DPMPTSP 1 laporan medsos: 4 laporanwebsite: 2 laporan publikasi (media online/cetak/elektronik): 2 laporan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	88,632,070	7 Dokumen	198,159,320	9 Dokumen	228,366,320	13 Dokumen	228,366,320	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,704,288,591**		**3,554,047,333**		**5,258,687,748**	**100%**	**7,497,311,076**	
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 dokumen*	*432.000*	*6 dokumen*	*432.000*	*8 dokumen*	*432.000*	*10 dokumen*	*432.000*	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Renja Tahun 2027 2. Perubahan Renja Tahun 2026	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	144.000	1 Dokumen	144.000	2 Dokumen	144.000	2 Dokumen	144.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Data LKPJ Tahun 2025 2. IKK Tahun 2025	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 laporan	144.000	2 laporan	144.000	2 laporan	144.000	2 laporan	144.000	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
						Realisasi Kinerja SKPD									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. LKJIP Tahun 2025 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 3. Monitoring Evaluasi RKPD Triwulanan Tahun 2026 (4 dokumen)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	144.000	3 Laporan	144.000	4 Laporan	144.000	6 Laporan	144.000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	*1 dokumen*	*1,150,838,265*	*1 dokumen*	*2,349,772,624*	*2 dokumen*	*3,795,358,970*	*3 dokumen*	*5,766,467,038*	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan TPP Tahun 2026	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	1,089,407,755	60 Orang/ bulan	2,056,042,114	90 Orang/ bulan	3,307,749,037	120 Orang/ bulan	4,823,928,691	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Admistrasi rutin: ATK, Honorarium, Jasa Outsourcing 2. Perjalanan Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	61,357,010	6 Dokumen	293,657,010	9 Dokumen	487,536,433	12 Dokumen	942,464,847	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Tahun 2025	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	73.500	1 laporan	73.500	1 laporan	73.500	1 laporan	73.500	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-		*1 laporan*	*144.000*	*1 laporan*	*144.000*	*2 laporan*	*144.000*	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Laporan BMD Semester I 2. Laporan BMD Semester II	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		1 laporan	144.000	1 laporan	144.000	2 laporan	144.000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*							*100%*	*172,200,000*	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1. Pengembangan Kompetensi Pegawai DPMPTSP & MPP 2. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-		-		32 Orang	172,200,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*31%*	*433,444,879*	*57%*	*941,999,380*	*80%*	*978,657,817*	*100%*	*1,022,388,105*	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,780,500	1 paket	1,780,500	1 paket	1,780,500	1 paket	3,619,500	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya &	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	404,044,549	5 Paket	876,375,655	5 Paket	876,375,655	5 Paket	876,375,655	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
					Belanja Modal Peralatan Permainan 2. Belanja Modal Mebel 3. Belanja Modal Alat Pendingin 4. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5. Belanja Modal Personal Computer & Belanja Modal Peralatan Personal Computer										
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Cetak Banner/ Spanduk 2. Penyediaan Bendera Nasional 3. Penyediaan karangan bunga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,205,980	1 Paket	30,015,375	2 Paket	48,159,812	3 Paket	77,744,950	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Cetak amplop dinas 2. Cetak map dinas dan kendali surat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,850,000	1 Paket	4,850,000	2 Paket	9,204,000	2 Paket	9,204,000	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Penyediaan Koran dan Majalah tiap bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2,100,000	6 Dokumen	3,960,000	9 Dokumen	5,820,000	12 Dokumen	8,880,000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Mamin Rapat 12 bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	10,463,850	6 Laporan	20,663,850	9 Laporan	32,963,850	12 Laporan	46,564,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan*	*25%*	*113,514,447*	*50%*	*246,699,329*	*75%*	*307,594,961*	*100%*	*502,679,933*	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan bahan pendukung surat menyurat 12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	2,000,000	6 Laporan	3,500,000	9 Laporan	6,000,000	12 Laporan	7,500,000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Listrik, Telepon dan Internet selama 12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	100,644,447	6 Laporan	143,963,079	9 Laporan	187,281,711	12 Laporan	358,887,433	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Servis Fotocopy, PC dan Peralatannya, Laptop, AC, Genset	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	10,870,000	6 Laporan	99,236,250	9 Laporan	113,813,250	12 Laporan	136,292,500	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	*1 unit*	*6,059,000*	*2 unit*	*15,000,000*	*3 unit*	*26,500,000*	*4 unit*	*33,000,000*	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	6,059,000	2 unit	15,000,000	3 unit	26,500,000	4 unit	33,000,000	

Kediri, 05 Desember 2025
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri

JOKO SUWONO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197501031993111001